

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yaitu proses transformasi negara untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kemajuan suatu negara dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah upaya pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah sebagai bagian dari kebijakan harus ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Secara umum, istilah kebijakan mengacu kepada tindakan kelompok, individu, atau lembaga pemerintah dalam suatu konteks. Winarno (2002:16) sebagaimana mengutip Carl Friedrich, menerangkan bahwa kebijakan yakni rencana tindakan dari kelompok, individu atau pemerintah dalam suatu situasi, yang menciptakan kendala serta peluang untuk melaksanakan dan mengatasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembangunan kabupaten adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama bagi penduduk kota, yang didukung oleh kekuatan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mencapai aspirasi bersama. Proses pembangunan di suatu daerah ditentukan lewat kebijakan dari Pemerintah Daerah. Ada visi misi dari Pemerintah Daerah untuk pedoman dalam melaksanakan pembangunan kabupaten. Upaya pembangunan ini dapat mencakup kebijakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata. Salah satu

aspek penting dalam pembangunan kabupaten adalah potensi di bidang perdagangan, yang dapat menjadi andalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan negara.

Sektor perdagangan berperan penting dalam ekonomi. Contohnya dapat dilihat di wilayah Jawa Timur terutama Kabupaten Gresik, yang mana persaingan dalam dunia perdagangan dirasakan oleh baik perusahaan besar maupun usaha kecil, termasuk menjadi pedagang kaki lima (PKL) berarti terlibat dalam kegiatan bisnis dengan menyediakan berbagai macam produk atau layanan. Biasanya, mereka cenderung berkolaborasi dengan pedagang lain yang menjalankan usaha serupa. Rudjito (2003) menyatakan bahwa PKL memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam jumlah usaha yang ada. Dalam konteks bisnis, pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha, yang berasal dari hasil perdagangan. Kenaikan pendapatan yang berkelanjutan dianggap krusial bagi para pelaku usaha atau perusahaan. Tanpa adanya pendapatan, tidak mungkin ada penghasilan yang diperoleh. Pendapatan memainkan peran vital dalam PKL, karena pendapatan tersebut menentukan perkembangan sektor perdagangan.

PKL memiliki dampak yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu menguntungkan dan merugikan. Efek menguntungkan/positif dari keberadaan PKL adalah kemampuannya dalam mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada

peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain, dampak negatif dari PKL adalah munculnya tantangan dalam pengaturan tata ruang, yang dapat mengganggu kenyamanan umum dan estetika di Kabupaten Gresik.

Hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) diatur dan dilarang untuk melakukan penjualan di area jalan Alun-Alun Kabupaten Gresik. Namun, di lapangan masih terdapat PKL yang tetap nekat berjualan di lokasi tersebut. Keberadaan PKL ini memang menguntungkan karena mereka dapat menarik minat pembeli yang lebih mudah dijangkau, sehingga pendapatan yang diperoleh pun meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka juga menghadapi risiko, seperti razia atau inspeksi yang dilakukan untuk menertibkan PKL, yang dapat mengakibatkan penyitaan atau pengangkutan barang secara paksa. Temuan pra-riset ini menunjukkan pentingnya pembinaan bagi PKL. Pembinaan berfungsi untuk menyegarkan mental dan psikologis individu dalam memahami arahan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, hubungan pembinaan PKL di kawasan Alun-Alun Kabupaten Gresik memerlukan dukungan dari Pemkab Gresik dan Satpol PP untuk memberikan penyuluhan mengenai peraturan daerah yang mengatur PKL.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2018 mengatur pengelolaan kawasan pedagang kaki lima (PKL) dengan menggunakan dana tugas pembantuan untuk tahun anggaran 2019.

Regulasi ini memberikan izin kepada PKL untuk memanfaatkan sarana usaha, fasilitas sosial, serta bangunan milik pemerintah atau swasta secara sementara, dengan ketentuan agar tidak merugikan pihak pemerintah atau menciptakan area kumuh.

Regulasi ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2013 yang bertujuan untuk mengelola dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kurangnya pembaruan dalam peraturan tersebut menyulitkan pengawasan terhadap PKL, sehingga fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, Alun-alun, yang merupakan simbol Kabupaten Gresik, dipenuhi oleh PKL. Oleh karena itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan membina PKL agar tidak mengganggu akses jalan umum, salah satunya dengan menyediakan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di Alun-alun yang dirancang untuk memindahkan PKL dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke lokasi yang lebih terstruktur. Dalam konteks ini, teori Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith (2011) menekankan bahwa ada empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, kebijakan yang ideal harus jelas dan dipahami oleh semua pihak terkait. Kedua, penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dengan tepat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, organisasi pelaksana memiliki peran krusial dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata; struktur dan komitmen organisasi tersebut sangat mempengaruhi hasil

implementasi. Terakhir, faktor lingkungan, termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi di sekitar pelaksanaan kebijakan juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan memahami interaksi antara keempat variabel ini, kita dapat lebih baik menganalisis dan merancang strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan PKL di Alun-alun Kabupaten Gresik.

Kebijakan pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diidentifikasi dalam beberapa penelitian sebelumnya. Salah satu studi awal yang membahas topik ini adalah dengan judul jurnal “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya” mengkaji penerapan kebijakan penataan PKL di sekitar Tugu Pahlawan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif, maka proses mengumpulkan data lewat observasi, wawancara, serta dokumentasi. Temuan menunjukkan banyak pedagang masih berjualan di lokasi terlarang, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang yang mematuhi peraturan. Penelitian merekomendasikan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pedagang serta penegakan hukum yang konsisten untuk mencapai penataan yang efektif. Jurnal ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penataan PKL yang lebih baik.

Penelitian berikutnya dimana Fokus penelitian adalah menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan PKL. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn, yang mencakup enam variabel kinerja kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan ini belum optimal, dengan PKL masih berjualan di trotoar, menandakan penataan dan relokasi yang tidak sesuai harapan. Terdapat juga kendala dalam komunikasi antar organisasi dan kurangnya fasilitas umum. Kesimpulannya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tambahan untuk meningkatkan efektivitas peraturan, termasuk penyediaan fasilitas dan penataan yang lebih baik bagi PKL.

Penelitian terakhir yang bertujuan untuk mengatur pedagang kaki lima di Tanjung *Expo Center*. Penelitian ini menilai efektivitas kebijakan dalam mengelola ruang bagi pedagang dan dampaknya terhadap ruang publik. Kebijakan ini mencakup program pembinaan jangka pendek untuk penataan kota dan jangka menengah untuk meningkatkan kemandirian pedagang. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan pada penerapan peraturan, seperti kurangnya pemahaman pedagang tentang regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penertiban, masih ada hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk mengangkat tema ini karena memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kasus-kasus yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk

melaksanakan penelitian ini sebagai bagian dari penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Kabupaten Gresik”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang, maka bisa dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kabupaten Gresik ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berperan sebagai studi dalam bidang Administrasi Publik, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengaturan peraturan daerah.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti dalam meningkatkan kemampuan

analisis terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait peraturan daerah.

- c. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan memberikan informasi perbandingan bagi peneliti lain yang berminat pada Administrasi Publik dan pelaksanaan kebijakan terhadap peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak, terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengaturan peraturan daerah.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pemerintah dan peraturan daerah.
- c. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang relevan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah implementasi kebijakan pemerintah tentang peraturan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyampaikan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai penelitian ini kepada pembaca, peneliti telah menyusun sistematika penulisan yang mencakup langkah-langkah yang diambil. Berikut adalah struktur penulisan yang dimaksud:

Bab I ini menyajikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab II mengulas penelitian-penelitian sebelumnya, landasan teori, dan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap penelitian ini.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan sebagai panduan bagi peneliti dalam mengumpulkan data terkait penerapan kebijakan pengaturan PKL tersebut.

Bab IV berisi analisis yang menggambarkan kondisi Kabupaten Gresik serta penyajian data mengenai penerapan kebijakan pengaturan PKL di Alun-Alun Kabupaten Gresik.

Bab V berisi penutup dari penulis dari penelitian yang telah dilakukan ini. Rekomendasi yang diberikan di luar temuan penelitian dapat berfungsi sebagai referensi dan saran untuk pengembangan lebih lanjut mengenai topik penelitian.

F.